Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab dan Kebahasaaraban
Vol 9 No 2 Oktober 2026
Page: 628-639
https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-miyar/index

Analisis Wacana Kebijakan Bahasa Arab pada Dokumen Resmi Nasional Mesir dan Organisasi Internasional

Akmal Rahmadi Sulaksono[1], Rizka Zahra Qonita[2], Hosita Laili Rahma[3]

Email: akmal.rahmadi.2302316@students.um.ac.id*[1], rizka.zahra.2302316@students.um.ac.id[2], hosita.laili.2502318@students.um.ac.id[3]

[1,2,3]Universitas Negeri Malang, Indonesia

DOI: http://doi.org/10.35931/am.v9i2.7204

Article Info
Received: July 16, 2026
Revised: October 26, 2026
Accepted: October 27, 2026

Correspondence:
Phone: +6282141332205

Abstract: Arabic occupies a strategic position in Egypt's social, political, and educational life, serving as a marker of identity, an instrument of administration, and a medium of instruction. Previous studies on Arabic have largely addressed pedagogical and sociolinguistic issues, and recent critical discourse studies on Al-Azhar's digital discourse or textbook coverage stop short of examining formal national and international policy texts. This study fills that gap by comparing the discursive construction of Arabic language policy in Egyptian national documents and international organizational documents, integrating Language Policy and Planning (LPP) with Fairclough's three-dimensional Critical Discourse Analysis. Using a qualitative descriptive-analytical design, the data comprise the 2014 Egyptian Constitution, education regulations, curriculum guidelines, and Al-Azhar documents, alongside texts from UNESCO, ALECSO, and the Arab League. Findings show that national documents construct Arabic through a vertically nested authority chain, state, ministry of education, and Al-Azhar, legitimized by discourses of identity and sovereignty, whereas international documents distribute status, acquisition, and corpus planning functions horizontally across UNESCO, ALECSO, and the Arab League, legitimized through discourses of heritage and diplomacy. These findings imply that synchronizing Arabic language policy requires concrete mechanisms, joint Al-Azhar-ALECSO coordination, explicit register-based curriculum provisions, and integrative lexical strategies, rather than normative appeals alone.
Keywords: *Arabic language policy; critical discourse analysis; language planning; Egyptian official documents; international organizations;*

PENDAHULUAN

Bahasa Arab memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan masyarakat Arab. Di Republik Arab Mesir, Bahasa Arab tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional, instrumen administrasi negara, serta medium utama dalam sistem pendidikan (Stadlbauer, 2010). Kedudukan tersebut diperkuat melalui berbagai regulasi negara yang menempatkan Bahasa Arab sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah bangsa Mesir. Konstitusi Republik Arab Mesir menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga identitas budaya dan peradaban nasional yang menjadi dasar legitimasi bagi kebijakan pengembangan bahasa dan pendidikan (Mansour, 2015). Dalam perspektif kebijakan bahasa, posisi formal suatu bahasa dalam konstitusi dan regulasi negara merupakan bagian dari *status planning*, yaitu upaya pemerintah dalam menentukan fungsi dan kedudukan suatu bahasa dalam masyarakat (Jaafarawi, 2022). Dengan demikian, kebijakan Bahasa Arab di Mesir tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan linguistik, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan identitas, kekuasaan, dan pembangunan budaya nasional (Barnawi, 2022).

Perkembangan global telah menghadirkan tantangan baru bagi kebijakan Bahasa Arab. Perubahan teknologi informasi, meningkatnya penggunaan bahasa global, mobilitas masyarakat, serta transformasi pendidikan menuntut adanya keseimbangan antara pelestarian Bahasa Arab dan pengembangan kemampuan komunikatif yang sesuai dengan kebutuhan modern (Rahmatika & Nandang, 2025). Kajian mengenai kebijakan bahasa menunjukkan bahwa keberhasilan suatu bahasa

Copyright © 2026, Author et al.
This open access article is distributed under a (CC-BY-SA) License

tidak hanya bergantung pada pengakuan hukum, tetapi juga pada bagaimana bahasa tersebut dikelola melalui pendidikan, kurikulum, bahan ajar, dan praktik penggunaan sehari-hari (Riyadi & Rozaanah, 2025). Dalam konteks Bahasa Arab, tantangan tersebut semakin kompleks karena adanya fenomena diglosia antara Bahasa Arab standar (*Modern Standard Arabic*) dan berbagai variasi Arab lokal yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kondisi ini memengaruhi pembelajaran, sikap bahasa, dan strategi pengembangan kompetensi berbahasa di berbagai negara Arab (Hamdan & Kessar, 2023). Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan Bahasa Arab perlu mempertimbangkan hubungan antara kebijakan formal, praktik pendidikan, dan dinamika sosial bahasa.

Selain menjadi instrumen identitas nasional, Bahasa Arab juga diposisikan sebagai bagian dari warisan budaya dunia. Organisasi internasional seperti UNESCO dan organisasi regional seperti *Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization* (ALECSO) menempatkan bahasa sebagai komponen penting dalam perlindungan keberagaman budaya dan penguatan kerja sama pendidikan. UNESCO menegaskan bahwa keberagaman bahasa merupakan bagian dari kekayaan budaya manusia yang perlu dilindungi melalui kebijakan pendidikan dan strategi pelestarian bahasa (Ouane & Glanz, 2010). Sementara itu, ALECSO memiliki mandat untuk mengembangkan pendidikan, kebudayaan, dan bahasa Arab di kawasan Arab melalui berbagai program penguatan literasi dan pengembangan sumber daya manusia (Stroud & Kerfoot, 2013). Perbedaan orientasi antara kebijakan nasional Mesir dan kebijakan organisasi internasional tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan bahwa Bahasa Arab dapat dipahami melalui dua perspektif berbeda: sebagai simbol kedaulatan budaya nasional dan sebagai aset linguistik global.

Penelitian mengenai kebijakan bahasa menunjukkan bahwa dokumen resmi tidak hanya berisi aturan administratif, tetapi juga mencerminkan ideologi, kepentingan, dan konstruksi sosial tertentu mengenai bahasa (Salsabila, 2021). Pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) menjelaskan bahwa teks kebijakan harus dianalisis sebagai praktik sosial yang mengandung relasi kekuasaan dan proses pembentukan makna (Sukrin & Muhlisina, 2025). CDA dalam penelitian kebijakan mencerminkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih ketat, transparan, dan reflektif secara kritis, sehingga mampu menghasilkan wawasan yang lebih tajam dan sensitif terhadap konteks untuk transformasi kebijakan (Azarian et al., 2023).

CDA merupakan pendekatan interdisipliner yang menelaah keterkaitan antara bahasa dan kekuasaan dalam masyarakat, dengan memandang bahasa sebagai suatu praktik sosial (Fang, 2011). Dalam konteks kebijakan Bahasa Arab, analisis wacana dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pemerintah Mesir, lembaga pendidikan, dan organisasi internasional membangun narasi tentang fungsi Bahasa Arab, aktor yang dianggap memiliki kewenangan, serta tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjawab "apa isi kebijakan", tetapi juga "bagaimana dan mengapa kebijakan tersebut dirumuskan dalam bentuk tertentu" (Al-Mushawwat, 2025). CDA dipahami sebagai metode untuk menganalisis secara kritis dinamika kekuasaan dalam teks tertulis, dengan menyoroti interaksi wacana antara penutur, penulis, dan pembaca (Azizah, 2026).

Berdasarkan perspektif kebijakan bahasa, persoalan utama dalam penelitian ini adalah adanya kemungkinan kesenjangan antara status formal Bahasa Arab dan implementasinya dalam praktik pendidikan serta pengembangan bahasa (Az-Zahra & Mulyadi, 2026). Kebijakan nasional Mesir cenderung menekankan kedudukan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi, identitas nasional, dan bagian dari sistem pendidikan, sedangkan dokumen internasional lebih menekankan aspek pelestarian budaya, keberagaman linguistik, dan kerja sama antarnegara (Setiyadi et al., 2024). Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan perlunya kajian komparatif untuk memahami bagaimana Bahasa Arab dikonstruksi dalam dua ranah kebijakan yang berbeda. Penelitian sebelumnya banyak membahas pembelajaran Bahasa Arab, kompetensi guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan sikap bahasa, tetapi kajian yang secara khusus membandingkan wacana kebijakan Bahasa Arab dalam dokumen resmi Mesir dengan dokumen organisasi internasional masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menjadi celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dikaji. Sebagian besar penelitian mengenai Bahasa Arab berfokus pada aspek pedagogis atau fenomena sosiolinguistik, sementara analisis terhadap dokumen kebijakan sebagai produk wacana politik dan sosial masih belum banyak dilakukan. Kesenjangan ini dapat dilihat secara lebih konkret pada penelitian mutakhir yang menyinggung objek serupa namun belum menjawab persoalan yang diangkat artikel ini. Penelitian analisis wacana kritis terhadap Al-Azhar yang terbit terbaru, misalnya, masih berfokus pada wacana digital di media sosial dan belum menyentuh dokumen kebijakan formal seperti konstitusi, undang-undang pendidikan, atau regulasi kurikulum (Ismail, 2026). Demikian pula, kajian CDA terhadap Bahasa Arab dalam ranah pendidikan masih cenderung menyasar buku teks dan liputan media, bukan dokumen kebijakan resmi negara maupun organisasi internasional secara komparatif (Alaoui, 2025). Kedua kajian tersebut menegaskan bahwa penerapan CDA terhadap teks kebijakan formal, khususnya yang membandingkan wacana negara dan organisasi internasional mengenai Bahasa Arab, masih menjadi celah yang belum terisi.

Padahal, dokumen kebijakan memiliki peran penting dalam menentukan arah perencanaan bahasa, termasuk penentuan prioritas pendidikan, pengembangan materi pembelajaran, dan legitimasi institusi yang terlibat dalam pengelolaan bahasa (Kurniasih & Wilsa, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui integrasi pendekatan *Language Policy and Planning* dan *Critical Discourse Analysis* untuk membandingkan bagaimana Bahasa Arab dikonstruksi dalam kebijakan nasional Mesir dan kebijakan organisasi internasional. Kebaruan tersebut secara spesifik terletak pada temuan bahwa integrasi LPP dan CDA mengungkap pola relasi aktor-fungsi yang berbeda menurut skala kelembagaan, suatu pola yang belum terungkap pada penelitian LPP maupun CDA yang berdiri sendiri. Pada level nasional, ketiga fungsi perencanaan bahasa dalam kerangka LPP, yaitu status, akuisisi, dan korpus/budaya, dikonstruksi secara berjenjang di bawah satu rantai otoritas (negara, Kementerian Pendidikan, dan Al-Azhar) yang dilegitimasi melalui wacana identitas dan kedaulatan nasional. Sebaliknya, pada level internasional, ketiga fungsi tersebut didistribusikan secara horizontal ke tiga lembaga yang berbeda, yaitu UNESCO, ALECSO, dan Arab League, yang masing-masing melegitimasi perannya melalui wacana warisan budaya dan diplomasi tanpa satu narasi kedaulatan tunggal yang menyatukannya. Pergeseran dari konfigurasi vertikal-tunggal menuju konfigurasi horizontal-terdistribusi inilah yang menjadi temuan baru penelitian ini, karena kajian LPP terdahulu umumnya berhenti pada klasifikasi jenis perencanaan bahasa tanpa menelusuri bagaimana wacana kebijakan melegitimasi ulang relasi antaraktor pada skala kelembagaan yang berbeda.

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen resmi dan perbandingan wacana kebijakan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan konstruksi kebijakan Bahasa Arab dalam dokumen resmi Republik Arab Mesir. Tahap kedua adalah menganalisis dokumen organisasi internasional yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian Bahasa Arab. Tahap ketiga adalah membandingkan kedua ranah kebijakan tersebut untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi bagi pengembangan kebijakan bahasa. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan bahasa nasional dan agenda pelestarian bahasa pada tingkat internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan konstruksi kebijakan Bahasa Arab dalam dokumen resmi Republik Arab Mesir; menganalisis konstruksi kebijakan Bahasa Arab dalam dokumen organisasi internasional; membandingkan wacana kebijakan Bahasa Arab antara kedua ranah tersebut; serta merumuskan implikasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan Bahasa Arab sebagai bahasa identitas nasional sekaligus bahasa budaya internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji konstruksi wacana kebijakan Bahasa Arab dalam dokumen resmi nasional Mesir dan organisasi internasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada interpretasi makna, representasi, strategi legitimasi, serta konstruksi ideologis yang terdapat dalam teks kebijakan, bukan pada pengukuran statistik terhadap fenomena bahasa . Dalam penelitian kualitatif, dokumen dapat diperlakukan sebagai sumber data utama untuk memahami bagaimana suatu realitas sosial dibangun melalui bahasa dan praktik kelembagaan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) dengan kerangka Fairclough yang memandang teks kebijakan sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan aktor, kepentingan, dan konteks kekuasaan (Mukaromah & Munip, 2026). CDA dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk kriminologi, pendidikan, pekerjaan sosial, hingga kajian media (Hopkyns & Zoghbor, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana Bahasa Arab direpresentasikan dalam kebijakan nasional Mesir dan dokumen organisasi internasional, serta bagaimana perbedaan konteks kelembagaan memengaruhi pembentukan wacana kebijakan bahasa.

Penggunaan model Fairclough dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa analisis teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural mampu mengungkap ideologi media dan kondisi sosial yang memengaruhi produksi wacana berbahasa Arab (Yuhandra et al., 2024). Pendekatan serupa juga digunakan dalam kajian buku teks bahasa Arab untuk menelusuri hubungan antara bahasa, ideologi, dan kekuasaan melalui analisis struktur teks dan praktik diskursif (Riyadi & Rozaanah, 2025).

Data penelitian berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan Bahasa Arab pada tingkat nasional Mesir dan tingkat organisasi internasional. Pemilihan dokumen dilakukan secara purposif berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: dokumen memiliki status resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara atau organisasi internasional yang berwenang; dokumen secara eksplisit memuat ketentuan, strategi, tujuan, atau pernyataan yang berkaitan dengan Bahasa Arab, pendidikan bahasa, kebudayaan, atau pelestarian bahasa; dokumen memiliki relevansi langsung dengan aspek perencanaan bahasa, khususnya status bahasa,

pengembangan bahasa, dan penyebaran bahasa melalui pendidikan; serta dokumen tersedia dalam bentuk publik yang dapat diakses dan diverifikasi melalui laman resmi institusi penerbit. Penggunaan dokumen resmi sebagai sumber data dipilih karena dokumen kebijakan merupakan representasi formal dari orientasi, prioritas, dan nilai yang ingin dilembagakan oleh suatu institusi (Abbas, 2025).

Dokumen nasional Mesir yang dianalisis meliputi Konstitusi Republik Arab Mesir tahun 2014, dokumen Undang-Undang Pendidikan, regulasi Kementerian Pendidikan Mesir mengenai kurikulum Bahasa Arab, pedoman silabus Bahasa Arab, serta dokumen pendidikan yang diterbitkan oleh institusi Al-Azhar. Dokumen-dokumen tersebut dipilih karena memiliki fungsi yang berbeda dalam menjawab fokus penelitian. Konstitusi digunakan untuk mengidentifikasi posisi simbolik dan legal Bahasa Arab sebagai bagian dari identitas negara serta dasar legitimasi kebijakan bahasa. Undang-Undang Pendidikan digunakan untuk melihat bagaimana posisi Bahasa Arab diterjemahkan dalam kerangka kelembagaan pendidikan nasional. Regulasi Kementerian Pendidikan dan pedoman silabus digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan bahasa dioperasionalkan dalam bentuk tujuan pembelajaran, kompetensi, materi, dan praktik pendidikan. Sementara itu, dokumen Al-Azhar digunakan untuk melihat peran institusi keagamaan dalam mempertahankan dan mengembangkan penggunaan Bahasa Arab, khususnya dalam konteks pendidikan keislaman dan transmisi tradisi keilmuan Arab.

Selain dokumen nasional, penelitian ini menggunakan dokumen organisasi internasional yang berasal dari UNESCO, ALECSO, dan Arab League. Dokumen UNESCO dipilih untuk menganalisis bagaimana Bahasa Arab dikonstruksi dalam perspektif keberagaman bahasa, warisan budaya, dan hak linguistik global. Dokumen ALECSO digunakan karena organisasi tersebut memiliki mandat khusus dalam pengembangan pendidikan, kebudayaan, dan Bahasa Arab di kawasan Arab. Sementara itu, dokumen Arab League digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana Bahasa Arab diposisikan sebagai instrumen integrasi regional, identitas bersama, dan kerja sama antarnegara Arab (Debre, 2021). Dengan demikian, kumpulan dokumen tersebut memungkinkan penelitian membandingkan dua ranah kebijakan, yaitu kebijakan nasional yang berorientasi pada identitas dan administrasi negara serta kebijakan internasional yang berorientasi pada pelestarian, diplomasi budaya, dan kerja sama linguistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan dokumen melalui situs resmi lembaga terkait, seperti portal pemerintah Mesir, Kementerian Pendidikan Mesir, Al-Azhar, UNESCO, ALECSO, dan Arab League. Setiap dokumen yang diperoleh kemudian disimpan dalam format PDF dan dicatat metadata pentingnya, meliputi judul dokumen, lembaga penerbit, tahun publikasi, jenis dokumen, serta tautan sumber resmi. Tahap kedua adalah proses seleksi dokumen berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Dokumen yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan Bahasa Arab, pendidikan bahasa, atau perencanaan bahasa tidak dimasukkan dalam korpus penelitian. Tahap ketiga adalah pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap dokumen terpilih untuk mengidentifikasi bagian teks yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Unit analisis penelitian berupa bagian-bagian teks kebijakan yang memiliki makna strategis, meliputi pasal atau ayat dalam dokumen hukum, paragraf kebijakan, butir kurikulum, pernyataan tujuan pendidikan, serta pernyataan strategis organisasi internasional. Unit analisis tersebut dipilih karena bagian-bagian tersebut secara langsung menunjukkan bagaimana institusi mendefinisikan fungsi Bahasa Arab, menentukan aktor yang memiliki kewenangan, serta menetapkan tujuan pengembangan bahasa. Seluruh data tekstual kemudian dikategorikan berdasarkan tema analisis, yaitu representasi Bahasa Arab sebagai bahasa resmi, identitas nasional, bahasa pendidikan, warisan budaya, instrumen literasi, dan objek pelestarian internasional.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, dilakukan analisis leksikal dengan mengidentifikasi istilah atau kata kunci yang sering muncul dalam dokumen, seperti "bahasa resmi", "identitas budaya", "warisan", "literasi", "kompetensi", "pendidikan", "pelestarian", dan istilah lain yang berkaitan dengan kebijakan bahasa. Analisis ini bertujuan menemukan pola pilihan bahasa yang digunakan oleh pembuat kebijakan dalam membangun makna tentang Bahasa Arab. Kedua, dilakukan identifikasi aktor wacana untuk mengetahui pihak-pihak yang diberi peran dan legitimasi dalam teks kebijakan, seperti pemerintah Mesir, kementerian pendidikan, Al-Azhar, UNESCO, ALECSO, dan Arab League. Ketiga, dilakukan analisis komparatif antara dokumen nasional Mesir dan dokumen organisasi internasional untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta hubungan antarwacana kebijakan.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan perangkat lunak pengolah dokumen dan analisis data kualitatif untuk membantu pengorganisasian data, serta pengelompokan tema (Tumanggor et al., 2024). Dokumen PDF dikonversi ke format teks apabila diperlukan untuk mempermudah proses pengkodean. Proses analisis dilakukan secara manual dengan bantuan tabel kategorisasi data yang berisi kutipan teks, sumber dokumen, kategori wacana, aktor yang muncul, serta interpretasi peneliti. Penggunaan prosedur pengkodean yang sistematis bertujuan menjaga konsistensi analisis

dan memungkinkan penelitian direplikasi oleh peneliti lain.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen resmi yang berasal dari institusi berbeda. Selain itu, interpretasi hasil analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan pendidikan yang melatarbelakangi produksi dokumen kebijakan. Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Bahasa Arab dibangun, dinegosiasikan, dan direpresentasikan dalam dokumen resmi nasional Mesir serta organisasi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Wacana Kebijakan Bahasa Arab dalam Dokumen Resmi Nasional Mesir

Hasil analisis terhadap dokumen resmi nasional Mesir menunjukkan bahwa kebijakan Bahasa Arab dibangun melalui tiga konstruksi wacana utama, yaitu Bahasa Arab sebagai simbol identitas dan legitimasi negara, Bahasa Arab sebagai instrumen utama pendidikan nasional, dan Bahasa Arab sebagai representasi kontinuitas budaya dan keagamaan. Ketiga konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bahasa Mesir tidak hanya berorientasi pada pengaturan fungsi bahasa secara administratif, tetapi juga membangun hubungan antara bahasa, sejarah, budaya, dan identitas nasional. Temuan ini diperoleh melalui analisis terhadap Konstitusi Republik Arab Mesir, dokumen kebijakan pendidikan, regulasi kurikulum Bahasa Arab, serta pedoman pendidikan Al-Azhar. Hasil kategorisasi wacana kebijakan Bahasa Arab dalam dokumen nasional Mesir dapat diringkas sebagai berikut.

Tabel 1: Temuan Analisis dalam Dokumen Resmi Mesir

Dimensi Wacana	Temuan Analisis	Aktor Utama	Orientasi Perencanaan Bahasa
Status bahasa	Bahasa Arab ditempatkan sebagai bahasa resmi negara, administrasi, dan pendidikan	Pemerintah Mesir	Status planning
Pendidikan bahasa	Bahasa Arab menjadi dasar pengembangan kompetensi literasi dan kurikulum nasional	Kementerian Pendidikan	Acquisition planning
Budaya dan agama	Bahasa Arab klasik dipertahankan sebagai medium tradisi keilmuan Islam	Al-Azhar	Corpus dan cultural planning

> *"Islam is the religion of the state and Arabic is its official language. The principles of Islamic Sharia are the principle source of legislation."* (Constitution of the Arab Republic of Egypt, 2014, Pasal 2)

Struktur deklaratif tanpa modalitas menempatkan status Bahasa Arab sejajar dan menyatu dengan status agama negara dalam satu kalimat tunggal, sehingga kedudukannya dihadirkan sebagai fakta konstitusional yang tidak dapat ditawar, bukan pilihan kebijakan; pemilihan frasa "official language" menegaskan fungsi administratif-legal bahasa. Teks ini diproduksi sebagai pasal pembuka konstitusi hasil referendum 2014, genre hukum tertinggi yang mengikat seluruh produk perundang-undangan di bawahnya, dan dikonsumsi ulang secara wajib oleh seluruh institusi negara termasuk regulasi pendidikan dan administrasi. Penyandingan Bahasa Arab dengan Islam dalam satu pasal merefleksikan identifikasi historis Bahasa Arab sebagai bahasa suci sekaligus bahasa kenegaraan pascakolonial Mesir, memperkuat narasi kedaulatan yang menyatukan agama, bahasa, dan negara sebagai satu kesatuan pascarevolusi 2011.

Temuan pertama menunjukkan bahwa Bahasa Arab dalam dokumen nasional Mesir memiliki fungsi simbolik yang kuat. Bahasa tidak hanya diposisikan sebagai alat komunikasi pemerintahan, tetapi juga sebagai elemen pembentuk identitas nasional. Posisi tersebut memperlihatkan karakter *status planning*, yaitu kebijakan yang menentukan kedudukan suatu bahasa dalam struktur sosial dan politik negara (Sidik, 2026). Dalam perspektif kebijakan bahasa, penetapan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi menunjukkan adanya proses pelembagaan bahasa melalui instrumen hukum negara (Sukrin & Muhlisina, 2025).

Hasil ini sejalan dengan kebijakan bahasa sering kali berfungsi sebagai instrumen ideologis yang menghubungkan bahasa dengan identitas, sejarah, dan kepentingan politik tertentu (Puspitasari et al., 2026). Dalam konteks Mesir, Bahasa Arab menjadi simbol kesinambungan peradaban Arab-Islam sekaligus sarana membangun kesatuan nasional. Dengan demikian, wacana kebijakan bahasa dalam dokumen negara menunjukkan bahwa bahasa memiliki fungsi yang melampaui aspek linguistik, yaitu sebagai representasi nilai budaya dan legitimasi kelembagaan.

> *"The Arabic language, religious education, and national history in all its stages are core subjects of pre-university public and private education."* (Constitution of the Arab Republic of Egypt, 2014, Pasal 24)

Penjajaran "Bahasa Arab, pendidikan agama, dan sejarah nasional" dalam satu frasa nominal menyusun Bahasa Arab bukan sebagai keterampilan komunikatif netral, melainkan sejajar dengan pembentukan identitas religius dan historis; kata "core" berfungsi sebagai penanda leksikal yang mewajibkan dan menutup ruang bagi Bahasa Arab menjadi mata pelajaran opsional. Sebagai pasal dalam bab pendidikan konstitusi, teks ini menjadi rujukan wajib bagi regulasi kurikulum dan pedoman silabus Kementerian Pendidikan, yang secara struktural harus menerjemahkan ketentuan "mata pelajaran inti" ini menjadi alokasi jam pelajaran dan standar kompetensi yang mengikat sekolah negeri maupun swasta. Ketentuan ini mencerminkan kekhawatiran negara atas ekspansi sekolah berkurikulum dan berbahasa pengantar asing di Mesir; dengan mewajibkan Bahasa Arab sebagai mata pelajaran inti bahkan di sekolah swasta, negara menegaskan otoritasnya atas ranah pendidikan sebagai instrumen reproduksi identitas nasional di tengah tekanan globalisasi pendidikan.

Dimensi kedua yang ditemukan adalah kuatnya orientasi pendidikan dalam kebijakan Bahasa Arab Mesir. Analisis terhadap dokumen pendidikan menunjukkan bahwa Bahasa Arab ditempatkan sebagai komponen utama dalam pembentukan kemampuan literasi peserta didik. Kurikulum Bahasa Arab tidak hanya diarahkan pada penguasaan struktur bahasa, tetapi juga pada kemampuan memahami teks, membangun kompetensi komunikasi, serta mempertahankan hubungan peserta didik dengan warisan literatur Arab.

Temuan tersebut menunjukkan dominasi aspek *acquisition planning*, yaitu upaya negara mengembangkan penggunaan bahasa melalui sistem pendidikan (Makoni et al., 2023). Pendidikan menjadi instrumen utama untuk memastikan keberlanjutan penggunaan Bahasa Arab antar-generasi. Keberhasilan kebijakan bahasa sangat bergantung pada hubungan antara regulasi formal dan praktik pendidikan (Amandha et al., 2026). Dengan demikian, dokumen kurikulum dan pedoman pembelajaran memiliki peran penting karena menerjemahkan ideologi bahasa negara ke dalam praktik pendidikan.

> *"Al-Azhar is an independent scientific Islamic institution, with exclusive competence over its own affairs... It is responsible for preaching Islam and disseminating the religious sciences and the Arabic language in Egypt and the world."* (Constitution of the Arab Republic of Egypt, 2014, Pasal 7)

Frasa "independent" dan "exclusive competence" memberikan Al-Azhar legitimasi otoritas terpisah dari birokrasi negara biasa, sementara verba "disseminating" menyandingkan penyebaran "the religious sciences and the Arabic language" sebagai satu paket tak terpisah, seolah pengetahuan agama dan bahasa Arab adalah satu objek diseminasi tunggal. Dalam praktik kewacanaan, klausul ini mengangkat institusi keagamaan non-pemerintah ke level pengaturan konstitusional setingkat lembaga negara, sebuah pencampuran genre hukum tata negara dengan otoritas keagamaan yang jarang ditemukan pada konstitusi negara-bangsa modern lain, dan menjadi rujukan bagi produk kebijakan Al-Azhar berikutnya termasuk kurikulum dan fatwa kebahasaan. Sedangkan dalam praktik sosiokultural, pemberian otoritas konstitusional pada Al-Azhar merefleksikan negosiasi historis pasca-2013 antara negara dan otoritas keagamaan tradisional, di mana Al-Azhar diposisikan sebagai penyeimbang narasi Islam moderat, sekaligus menjadikan Bahasa Arab klasik (fusha) sebagai medium otoritas keagamaan yang dilindungi negara dari perubahan.

Selain pemerintah, Al-Azhar muncul sebagai aktor penting dalam konstruksi wacana Bahasa Arab. Hasil analisis menunjukkan bahwa dokumen Al-Azhar memberikan penekanan terhadap penguasaan Bahasa Arab klasik sebagai bagian dari pemahaman teks keagamaan dan tradisi intelektual Islam. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa Bahasa Arab tidak hanya dipertahankan sebagai bahasa nasional, tetapi juga sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan agama (Lintang, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan Bahasa Arab di Mesir memiliki karakter multidimensional. Bahasa Arab berada pada persimpangan antara kepentingan negara, pendidikan, dan institusi keagamaan. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa teks kebijakan merupakan praktik sosial yang mencerminkan hubungan antara bahasa, institusi, dan kekuasaan (Lukitadyana et al., 2025).

2. Konstruksi Wacana Kebijakan Bahasa Arab dalam Dokumen Organisasi Internasional

Analisis terhadap dokumen UNESCO, ALECSO, dan Arab League menunjukkan bahwa konstruksi wacana Bahasa Arab pada tingkat internasional memiliki orientasi yang berbeda dibandingkan dokumen nasional Mesir. Jika dokumen nasional lebih menekankan aspek identitas negara dan pendidikan, dokumen internasional lebih banyak membangun Bahasa Arab sebagai bagian dari warisan budaya dunia, hak linguistik, serta instrumen kerja sama budaya. Hasil analisis dokumen internasional dapat dirangkum sebagai berikut.

Tabel 2: Temuan Analisis dalam Dokumen Resmi Organisasi Internasional

Dimensi Wacana	Temuan Analisis	Aktor Utama
Pelestarian budaya	Bahasa Arab diposisikan sebagai bagian dari keberagaman budaya dunia	UNESCO
Hak linguistik	Bahasa dipahami sebagai bagian dari keberagaman dan akses budaya	UNESCO
Pengembangan kapasitas	Dukungan terhadap materi pendidikan dan peningkatan kompetensi pengajar	ALECSO
Diplomasi budaya	Bahasa Arab menjadi sarana hubungan antarnegara Arab	Arab League

> *"The Arabic language is a pillar of the cultural diversity of humanity."* (UNESCO, World Arabic Language Day, 2025)

Metafora "pillar" mengonstruksi Bahasa Arab sebagai unsur penyangga struktural bagi entitas abstrak yang jauh lebih besar, yaitu "keberagaman budaya umat manusia", bukan sebagai bahasa milik satu bangsa tertentu; skala referen bergeser dari kepemilikan nasional menjadi kepemilikan universal ("humanity"). Dalam praktik kewacanaan, teks ini diproduksi dan didistribusikan melalui genre perayaan tahunan sejak 2012, dikonsumsi oleh khalayak global multibahasa melalui kanal digital resmi UNESCO, sebuah genre wacana afirmatif-seremonial yang berbeda dari genre hukum konstitusional preskriptif-mengikat pada dokumen Mesir. Sedangkan dalam praktik sosiokultural, framing "pilar keberagaman budaya" menempatkan Bahasa Arab dalam paradigma multilateralisme UNESCO yang menekankan pluralitas linguistik sebagai warisan bersama umat manusia, namun sekaligus melepaskan Bahasa Arab dari konteks kekuasaan negara-bangsa tunggal mana pun.

> *"...the 2025 celebrations aim to promote linguistic equity, empower diverse communities, and ensure Arabic remains a vibrant, adaptable language rooted in its rich cultural heritage."* (UNESCO, World Arabic Language Day 2025 – Innovative Pathways for Arabic)

Rangkaian tiga verba tindakan "promote… empower… ensure" menyusun agenda aktif-transformatif, dengan istilah "linguistic equity" sebagai leksikon hak asasi yang menempatkan Bahasa Arab dalam kerangka keadilan sosial-linguistik bagi "diverse communities", bukan semata pelestarian warisan. Dalam praktik kewacanaan, frasa ini muncul dalam materi promosi tematik tahunan yang disusun UNESCO bersama mitra kementerian anggota, genre kebijakan-advokasi yang secara intertekstual merujuk pada kerangka hak asasi bahasa yang lebih luas, didistribusikan untuk memengaruhi agenda kebijakan pendidikan dan media negara-negara anggota. Sedangkan dalam praktik sosiokultural, penekanan pada "ekuitas" dan "komunitas yang beragam" merefleksikan pergeseran wacana kebijakan bahasa internasional dari paradigma pelestarian pasif menuju paradigma hak asasi aktif, yang turut merespons realitas diglosia dan marginalisasi varian Arab lokal dalam sistem pendidikan berbasis Arab baku di banyak negara Arab, termasuk Mesir.

Dokumen UNESCO menunjukkan bahwa Bahasa Arab dipahami dalam kerangka keberagaman bahasa dan pelestarian budaya. Perspektif ini berbeda dengan pendekatan negara yang lebih menekankan fungsi administratif dan pendidikan. Dalam konteks internasional, bahasa dipandang sebagai bagian dari warisan manusia yang perlu dijaga melalui kebijakan multibahasa dan perlindungan budaya (Luksiawati et al., 2025).

Temuan ini memperlihatkan bahwa organisasi internasional memainkan peran sebagai aktor yang memperluas makna Bahasa Arab dari bahasa nasional menjadi aset budaya global. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bahasa tidak hanya berlangsung dalam batas negara, tetapi juga melalui jaringan institusi internasional yang memiliki kepentingan dalam pelestarian budaya dan keberagaman linguistik.

> *"ALECSO was established with the aim of promoting Arab intellectual unity through education, culture and sciences, and enhancing the educational, cultural and scientific level in the Arab World so that it can positively contribute to universal civilization."* (ALECSO, Pasal 1 Konstitusi ALECSO, dikutip pada laman resmi ALECSO "About Us")

Nomina abstrak "unity" dijadikan tujuan yang dicapai melalui tiga instrumen fungsional yang disebut berurutan, "education, culture and sciences", menunjukkan model perencanaan bahasa yang eksplisit berorientasi pengembangan kapasitas lintas sektor, bukan sekadar status legal; frasa penutup "contribute to universal civilization" menempatkan hasil akhirnya sebagai kontribusi pada peradaban global. Dalam praktik kewacanaan, sebagai pasal pembuka konstitusi organisasi antarpemerintah regional yang didirikan 1970 di bawah Liga Arab, teks ini berfungsi sebagai mandat institusional yang diterjemahkan ke dalam program teknis ALECSO

seperti Strategi Pengembangan Bahasa Arab 2018–2030, dirujuk ulang secara rutin dalam laporan dan strategi turunannya. **Dalam praktik sosiokultural,** penekanan pada "persatuan intelektual Arab" melalui pendidikan mencerminkan proyek pan-Arabisme pascakolonial tahun 1970-an yang memandang kerja sama pendidikan-kebudayaan sebagai jalan menuju integrasi regional, orientasi yang bertahan hingga kini sebagai landasan program peningkatan kapasitas Bahasa Arab lintas negara anggota, termasuk Mesir.

ALECSO memiliki posisi khusus karena berfungsi sebagai organisasi regional yang secara langsung berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan Arab. Analisis menunjukkan bahwa ALECSO menekankan pengembangan sumber daya pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Arab, dan penguatan kerja sama antarnegara Arab. Fokus tersebut menunjukkan bahwa organisasi regional berperan dalam menghubungkan kebijakan bahasa dengan kebutuhan praktis pendidikan (Madinah et al., 2025).

> *"Arabism is not a racist or ethnic concept, rather it is a unified cultural identity, with the Arabic language as its means of expression and of preserving its heritage."* (Deklarasi KTT Liga Arab ke-19, Riyadh, 2007)

Struktur negasi-afirmasi ("is not… rather it is…") secara eksplisit menyangkal pembacaan rasial/etnis atas "Arabism" sebelum menggantinya dengan definisi kultural, sebuah strategi retoris defensif; Bahasa Arab diposisikan secara instrumental sebagai "means of expression" bagi identitas yang lebih besar, bukan sebagai identitas itu sendiri. Dalam praktik kewacanaan, teks ini diproduksi dalam genre deklarasi puncak pimpinan negara, hasil forum politik tertinggi Liga Arab, yang menjadi rujukan bagi dokumen turunan seperti Strategi Arab untuk Promosi Bahasa Arab pada Organisasi Internasional dan Regional (2020); genre ini bersifat deklaratif-politis dan dikonsumsi sebagai pedoman arah kebijakan luar negeri kebudayaan. Dalam praktik sosiokultural, pernyataan ini muncul dalam konteks kekhawatiran fragmentasi identitas Arab pascainvasi Irak 2003 dan meningkatnya sentimen sub-nasional di kawasan; dengan menjadikan Bahasa Arab sebagai perekat identitas lintas-negara, Liga Arab memosisikan bahasa sebagai instrumen diplomasi dan soft power untuk mempertahankan kohesi regional.

Sementara itu, Arab League membangun wacana Bahasa Arab sebagai unsur pemersatu masyarakat Arab. Dalam dokumen-dokumen organisasi tersebut, bahasa diposisikan sebagai simbol hubungan historis dan budaya antarnegara anggota. Dengan demikian, Bahasa Arab dalam wacana internasional memiliki dimensi diplomatik yang tidak ditemukan secara dominan dalam dokumen nasional.

3. Perbandingan Wacana Kebijakan Bahasa Arab Nasional dan Internasional

Perbandingan antara dokumen nasional Mesir dan dokumen organisasi internasional menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan orientasi kebijakan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3: Perbandingan Wacana

Aspek	Dokumen Nasional Mesir	Dokumen Internasional
Fungsi utama bahasa	Identitas nasional, administrasi, pendidikan	Warisan budaya, diplomasi, keberagaman bahasa
Aktor dominan	Pemerintah, Kementerian Pendidikan, Al-Azhar	UNESCO, ALECSO, Arab League
Strategi kebijakan	Regulasi hukum dan kurikulum	Program, kerja sama, dan pengembangan kapasitas
Orientasi	Kepentingan nasional	Kepentingan regional-global

Persamaan utama kedua ranah tersebut terletak pada pandangan bahwa Bahasa Arab merupakan bahasa yang harus dilindungi dan dikembangkan. Baik pemerintah Mesir maupun organisasi internasional sama-sama menempatkan Bahasa Arab sebagai bahasa yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi. Namun, perbedaan muncul pada tujuan utama kebijakan. Dokumen nasional Mesir menunjukkan orientasi domestik, yaitu mempertahankan fungsi Bahasa Arab dalam administrasi negara dan pendidikan. Sebaliknya, dokumen internasional lebih menekankan dimensi global, yaitu pelestarian bahasa, kerja sama budaya, dan perlindungan keberagaman linguistik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa satu bahasa dapat memiliki konstruksi makna yang berbeda tergantung pada konteks institusionalnya. Dalam perspektif analisis wacana kritis, bahasa dalam dokumen kebijakan tidak bersifat netral, tetapi selalu berkaitan dengan tujuan sosial dan politik tertentu (Hidayatullah et al., 2026).

4. Implikasi Hasil Analisis terhadap Perencanaan Bahasa Arab

Hasil penelitian memberikan beberapa implikasi bagi pengembangan kajian dan praktik kebijakan bahasa. Pertama, pada tingkat teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kebijakan bahasa perlu mempertimbangkan hubungan antara kebijakan nasional dan internasional. Bahasa tidak hanya dikelola melalui

regulasi negara, tetapi juga melalui jaringan organisasi dan institusi global. Kedua, pada tingkat praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional Mesir dan agenda internasional. Kerangka nasional yang kuat dalam bidang pendidikan dapat diperkuat melalui kerja sama internasional dalam pengembangan bahan ajar, peningkatan kompetensi guru, dan inovasi pembelajaran. Ketiga, hasil penelitian menunjukkan perlunya keseimbangan antara pelestarian Bahasa Arab klasik dan pengembangan kompetensi komunikatif modern. Kebijakan bahasa yang hanya menekankan aspek sejarah dan identitas berpotensi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern (Azhima, 2025). Sebaliknya, modernisasi tanpa mempertimbangkan nilai budaya dapat melemahkan fungsi identitas bahasa.

Berdasarkan pola wacana yang ditemukan (Tabel 1-3), keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui tiga langkah konkret, bukan sekadar imbauan normatif. Pertama, oleh karena wacana pelestarian Bahasa Arab klasik didominasi oleh Al-Azhar sedangkan wacana pengembangan kapasitas dan kompetensi komunikatif didominasi oleh ALECSO, sinkronisasi dapat ditempuh melalui forum kerja sama teknis tetap antara Al-Azhar dan ALECSO yang secara khusus menyelaraskan silabus Bahasa Arab klasik dengan modul kompetensi komunikatif dan digital ALECSO, sehingga dokumen kurikulum nasional memuat dua jalur kompetensi yang eksplisit dan saling merujuk, bukan satu jalur identitas tunggal seperti yang berlaku saat ini. Kedua, oleh karena dokumen UNESCO membingkai Bahasa Arab melalui wacana keberagaman dan hak linguistik sementara dokumen nasional Mesir belum menyinggung variasi Bahasa Arab lokal, pembuat kebijakan dapat mengadopsi pembagian fungsi register secara eksplisit dalam regulasi kurikulum, yaitu mempertahankan Modern Standard Arabic sebagai bahasa baku untuk ranah formal dan tertulis, sekaligus secara resmi mengakomodasi variasi lisan dalam pembelajaran komunikasi sehari-hari dengan merujuk pada kerangka hak linguistik UNESCO. Ketiga, pada level redaksi dokumen, kebijakan bahasa nasional dapat direvisi dengan strategi leksikal ganda, yaitu mempertahankan istilah yang menegaskan identitas dan warisan sembari menambahkan istilah yang menegaskan kompetensi komunikatif, inovasi, dan literasi digital, mengikuti pola leksikal yang telah berkembang dalam dokumen ALECSO dan UNESCO.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa perencanaan bahasa merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan analisis dokumen. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat memperluas kajian melalui wawancara dengan pembuat kebijakan, guru Bahasa Arab, dan peserta didik untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen nasional Mesir yang meliputi Konstitusi Republik Arab Mesir, dokumen kebijakan pendidikan, regulasi kurikulum Bahasa Arab, pedoman silabus, dan dokumen institusi Al-Azhar, serta dokumen organisasi internasional yang berasal dari UNESCO, ALECSO, dan Arab League, penelitian ini menunjukkan bahwa Bahasa Arab dikonstruksi melalui fungsi dan orientasi kebijakan yang berbeda sesuai dengan konteks kelembagaan masing-masing aktor. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan Bahasa Arab tidak hanya berkaitan dengan pengaturan penggunaan bahasa, tetapi juga merepresentasikan kepentingan sosial, budaya, pendidikan, dan politik yang melekat pada bahasa tersebut.

Pada aspek pendidikan, penelitian ini menemukan bahwa dokumen nasional Mesir membangun wacana Bahasa Arab sebagai sarana pembentukan kompetensi literasi, kemampuan akademik, dan transmisi nilai budaya. Kurikulum Bahasa Arab tidak hanya diarahkan pada penguasaan aspek kebahasaan, tetapi juga pada pembentukan hubungan peserta didik dengan tradisi intelektual dan budaya Arab. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen utama dalam reproduksi kebijakan bahasa negara. Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah dan lembaga pendidikan memiliki posisi strategis dalam mempertahankan keberlangsungan Bahasa Arab standar sebagai bahasa akademik dan resmi, meskipun dalam praktik sosial masyarakat Mesir terdapat keberadaan variasi bahasa Arab lokal.

Selain pemerintah, penelitian ini menemukan bahwa Al-Azhar memiliki peran penting dalam memperkuat konstruksi Bahasa Arab sebagai bahasa ilmu, agama, dan tradisi intelektual Islam. Keterlibatan Al-Azhar menunjukkan bahwa kebijakan Bahasa Arab di Mesir tidak hanya dibentuk oleh institusi negara, tetapi juga oleh lembaga sosial-keagamaan yang memiliki legitimasi historis. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan Bahasa Arab di Mesir merupakan hasil interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan fungsi berbeda dalam mempertahankan keberadaan bahasa tersebut.

Sementara itu, analisis terhadap dokumen organisasi internasional menunjukkan konstruksi wacana yang berbeda. UNESCO, ALECSO, dan Arab League cenderung membangun Bahasa Arab sebagai bahasa warisan budaya, bagian dari keberagaman linguistik dunia, serta instrumen diplomasi budaya. Dalam konteks internasional, Bahasa Arab tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan suatu negara, melainkan sebagai aset budaya global yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. UNESCO menekankan aspek perlindungan keberagaman bahasa dan kontribusi bahasa terhadap perkembangan

peradaban manusia, sedangkan ALECSO dan Arab League lebih menekankan penguatan kerja sama pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan Bahasa Arab di kawasan Arab.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pertama, pada tingkat kebijakan, pemerintah dan organisasi internasional perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat dalam merancang strategi pengembangan Bahasa Arab, terutama dalam bidang pendidikan, digitalisasi sumber belajar, dan pengembangan terminologi modern. Kedua, pada tingkat teoritis, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian kebijakan Bahasa Arab dengan menggabungkan perspektif perencanaan bahasa, analisis wacana, dan kajian identitas linguistik untuk memahami dinamika bahasa Arab secara lebih komprehensif. Ketiga, penelitian lanjutan perlu melibatkan data empiris melalui wawancara dengan pembuat kebijakan, guru Bahasa Arab, peserta didik, dan pengguna bahasa untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang tertuang dalam dokumen diterapkan dalam praktik sosial. Keempat, penelitian berikutnya dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan kebijakan Bahasa Arab di negara Arab lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi strategi perencanaan Bahasa Arab dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, F. (2025). Linguistic Planning and Its Relationship to Language Policy. *Pegem Journal of Education and Instruction*, *15*(4), 4146–4154.

Alaoui, S. M. (2025). A Critical Discourse Analysis of Media Coverage on Moroccan Arabic in Textbooks and Arabic Language Acquisition in Morocco. *Discover Education*, 4, 130. https://doi.org/10.1007/s44217-025-00544-0

Al-Mushawwat, B. (2025). Critical Discourse Analysis of Ideology in Translating Political News. *AWEJ for Translation & Literary Studies*, *9*(4), 123–140. http://dx.doi.org/10.24093/awejtls/vol9no4.10

Amandha, M. D., Sugiarto, Takdir, M., & Takdir, K. (2026). Efektivitas Kebijakan Literasi Bahasa di Sekolah: Tinjauan Sistematis. *Media Manajemen Pendidikan*, *8*(3), 514–532. https://doi.org/10.30738/mmp.v8i3.21540

Az-Zahra, N., & Mulyadi, M. (2026). Fenomena Kebernyawaan dalam Bahasa Arab. *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, *9*(1), 24. https://doi.org/10.35931/am.v9i1.5128

Azarian, M., Yu, H., Shiferaw, A. T., & Stevik, T. K. (2023). Do We Perform Systematic Literature Review Right? A Scientific Mapping and Methodological Assessment. *Logistics*, *7*(4), 89. https://doi.org/10.3390/logistics7040089

Azhima, F. (2025). Kebutuhan Pembacaan Baru Di Tengah Masyarakat Multikultural. *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 489–503. https://doi.org/10.65802/nihayah.v1i2.49

Azizah, A. N. (2026). Perbandingan Sistem Pendidikan Islam di Arab Saudi, Mesir, dan Turki: Antara Tradisi dan Modernisasi. *An-Nahdhah: Journal of Education and Culture*, *1*(2), 67–90. https://doi.org/10.63199/an-nahdhah.v1i1.18

Barnawi, O. Z. (2022). Branding in Transnational English Medium Instruction-Oriented Universities in The Arabian Gulf: Implications for Language Policy. *Eurasian Journal of Applied Linguistics*, *8*(1), 58–72. https://doi.org/10.32601/ejal.911519

Debre, M. J. (2021). Legitimation, regime survival, and shifting alliances in the Arab League: Explaining sanction politics during the Arab Spring. *International Political Science Review*, *42*(4), 516–530. https://doi.org/10.1177/0192512120937749

Fang, Y. (2011). On evaluation of the theoretical soundness of critical discourse analysis. *Theory and Practice in Language Studies*, *1*(7), 875–878. https://doi.org/10.4304/tpls.1.7.875-878

Hamdan, J. M., & Kessar, S. (2023). Language Policy and Planning in Algeria: Case Study of Berber Language Planning. *Theory and Practice in Language Studies*, *13*(1), 59–68. https://doi.org/10.17507/tpls.1301.08

Hidayatullah, N., Hasan, M. A. K., Rhain, A., & Nugroho, K. (2026). Ideologi Politik Dan Terjemah Al-Qur'an Indonesia. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, *9*(1), 2188–2200. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.3200

Hopkyns, S., & Zoghbor, W. (2022). Arabic vis-à-vis English in the Gulf: Bridging the ideological divide. *Linguistic Identities in the Arab Gulf States: Waves of Change*, 17–32. https://doi.org/10.4324/9781003149637-3

Ismail, H. U. (2026). Constructing Islamic Moderation in Arabic Digital Discourse: A Critical Discourse Analysis of Al-Azhar's Platform X. *MECRI: Middle Eastern Culture & Religion Issues*, 5(1), 59-74. https://doi.org/10.22146/mecri.v5i1.29261

Jaafarawi, N. (2022). Current discussions on plurilingual pedagogy: Language learning implications in the Arabian Peninsula. *Plurilingual Pedagogy in the Arabian Peninsula: Transforming and Empowering Students and Teachers*, 24–38. https://doi.org/10.4324/9781003315971-4

Kurniasih, E., & Wilsa, J. (2023). Meneroka Perencanaan Bahasa Dan Literasi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, *1*(7), 430–436. https://jutepe-

joln.net/index.php/JURPERU/article/view/426

Lintang, D. (2023). Bahasa Arab Sebagai Identitas Budaya Islam. *Ta'limi: Journal of Arabic Education & Arabic Studies Website:*, *2*(1), 73–86. https://doi.org/10.53038/tlmi.v2i1.60

Lukitadyana, A., Septiani, D. R., & Kusmiaji, I. G. N. (2025). Bahasa Ekonomi & Politik Legitimasi Kebijakan : Analisis Linguistik Kritis Berita Nasional. *Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, *4*(4), 257–269. https://doi.org/10.58218/literasi.v3i1.1074

Luksiawati, E., Natalia, F., & Fadilah, I. (2025). Analisis Ekologi Bahasa terhadap Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia. *Jupensal (Jurnal Pendidikan Universal)*, *2*(3), 105–117. https://journalwbl.com/index.php/jupensal/article/view/468

Madinah, N., Sabilila, A. S., Khanifah, Panggeda, A. S., Muasomah, & Mukhlis, A. (2025). Eksplorasi Kebijakan Bahasa dan Pendidikan Nasional Indonesia. *Jurnal Bahasa Indonesia*, *3*(1), 51–60. https://doi.org/10.59966/jbi.v3i1.1797

Makoni, S., Severo, C., & Abdelhay, A. (2023). Postcolonial Language Policy and Planning and the Limits of the Notion of the Modern State. *Annual Review of Linguistics*, *9*, 483–496. https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-030521-052930

Mansour, A. (2015). Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014. *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law Online*, *17*(1), 381–455. https://doi.org/10.1163/9789004283688_020

Mukaromah, Z., & Munip, A. (2026). Bahasa, Ideologi, dan Kekuasaan dalam Pendidikan Bahasa Arab: Tinjauan Systematic Literature Review. *Jumlatuna: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, *2*(1), 76–90. https://ejournal.staidhtulungagung.ac.id/index.php/jumlatuna/article/view/170

Ouane, A., & Glanz, C. (2010). *Why and how Africa should invest in African languages and multilingual education* (C. Marwecki, Ed.). UNESCO Institute for Lifelong Learning. https://eric.ed.gov/?id=ED540509

Puspitasari, A. S. D., Prasetyo, R., Ayuningtyas, A. P., Parosa, J. R., Mahfira, F. A. N., Suwandi, S., & Anindyarini, A. (2026). Hermeneutika Bahasa dalam Identitas dan Ideologi Pada Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2025. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *9*(2), 324–336. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/108917

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, *1*(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Rahmatika, A., & Nandang, A. (2025). Relasi Bahasa Dan Dialek Dalam Perspektif Teoretis Dan Kebijakan: Kajian Atas Identitas, Variasi, Dan Perubahan Bahasa. *Al Mi'yar: Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, *8*(2), 491–498. https://doi.org/10.35931/am.v8i2.5447

Riyadi, S., & Rozaanah, R. (2025). Membingkai Konsep Keagamaan Dalam Buku Teks Bahasa Arab: Analisis Wacana Kritis Terhadap Strategi Komunikatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, *9*(2), 70. https://doi.org/10.30829/komunikologi.v9i2.26929

Salsabila, T. A. (2021). Studi Ihwal Kurikulum, Guru, Dan Sarana Pembelajaran Bahas Arab Dalam Perspektif Perencanaan Bahasa. *Taqdir*, *7*(1), 61–75. https://doi.org/10.19109/taqdir.v7i1.7616

Setiyadi, A. C., Putri, N. M., & Silmy, A. N. (2024). Study of Differences in Arabic Lahjah : Dialectal Variations in Various Arab Countries. *Al-Mi'yar:Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban*, *7*(2), 619–629. http://doi.org/10.35931/am.v7i2.3659

Sidik, A. (2026). Arabic Language in the Future : Strategic Directions and Transformative Innovations. *Diniyyah International Conference (D-IC)*, *2*(1), 23–37.

Stadlbauer, S. (2010). Language ideologies in the Arabic diglossia of Egypt. *Colorado Research in Linguistics*, *22*(June), 1–19. https://doi.org/10.25810/tdja-6p88

Stroud, C., & Kerfoot, C. (2013). Towards rethinking multilingualism and language policy for academic literacies. *Linguistics and education*, *24*(4), 396-405. https://doi.org/10.1016/j.linged.2013.09.003

Sukrin, & Muhlisina, S. (2025). Bahasa sebagai Alat Kekuasaan: Telaah Kontekstual dalam Analisis Wacana Kritis. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *9*(32), 471-482 : https://doi.org/10.71301/jipdasmen.v2i3.161

Tumanggor, S., Tanjung, H., Pasaribu, A., Simbolon, S. N. I., & Pasaribu, I. (2024). Software Analisis Data Kualitatif (Studi Penggunaan Software ATLAS.Ti dalam Penelitian Kualitatif). *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(1), 37–48. https://doi.org/10.63911/jhynfn10

Yuhandra, M. G., Nugraha, T. C., & Lukman, F. (2024). Ideologi Al-Jazeera Arabic dalam wacana pemberitaan visi Saudi Muhammad bin Salman (analisis wacana model Fairclough). *Diglosia:*

Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, *7*(1), 9–24. https://doi.org/10.30872/diglosia.v7i1.808